

ABSTRAK

Setelah terjadi reformasi, otonomisasi daerah seakan-akan memberikan peluang bagi daerah-daerah untuk berkembang. Dari sisi jumlah, terjadi peningkatan jumlah propinsi diikuti dengan peningkatan kabupaten kota dan kecamatan-kecamatan yang merupakan salah satu syarat mutlak terjadinya pemekaran. Dari aspek tujuan, pemekaran bertujuan untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan-pembangunan diberbagai bidang. Tapi Otonomi daerah yang berwujud pada pemekaran wilayah menyisakan banyak persoalan. Daerah-daerah yang merasa tidak puas beramai-ramai menuntut mekar lepas dari kabupaten atau propinsi induk dengan harapan dapat mengatur diri sendiri. Pemekaran daerah juga setidaknya ikut memberikan harapan bagi masyarakat di daerah mekaran baru, khususnya akses ke sumber-sumber daya publik. Etnis yang termarjinalkan mulai bangkit dan memperjuangkan hak-haknya. Terjadi tegangan antara para pendatang dan putera daerah.

Masalah tegangan antara para pendatang dan putera daerah juga terjadi pada Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Perebutan sumber-sumber daya publik pasca pemekaran kabupaten seakan-akan menjadi sebuah arena pertarungan identitas “asli” dan bukan. Isu pengutamaan putera daerah yang beredar bersamaan dengan perjuangan pemekaran kabupaten seakan-akan menjadi sebuah harga mati. Putera daerah mengklaim hak mereka pada sumber-sumber daya publik.

Tesis ini bermaksud menunjukkan bahwa motivasi pemekaran kabupaten Seram Bagian Barat untuk kepentingan masyarakat, yakni agar masyarakat SBB dapat menikmati pembangunan yang setara dengan daerah-daerah lainnya. Selain itu motif lainnya adalah memperjuangkan nasib putera daerah yang setiap kali harus kalah dan tersingkir dalam perebutan sumber-sumber daya publik. Namun motivasi motivasi terselubung yang dibawa oleh masing-masing tokoh pemekaran justru menjadikan putera daerah berada pada tingkatan yang sama dengan para pendatang. Identitas sebagai yang asli/lokal bukan menjadi sebuah jaminan kesuksesan dalam perebutan sumber-sumber daya publik. Putera daerah pada

akhirnya harus mengalami hal yang sama ketika masih berada dalam wilayah administratif Kabupaten Maluku Tengah. Masyarakat Waisarisa yang adalah mantan pekerja pabrik turut merasakannya. Bagi mereka ketika bersama dalam perebutan sumber daya publik, sesama mantan pekerja pabrik yang merupakan etnis lain dianggap merupakan saingan. Tetapi ketika mereka sama-sama gagal dalam perebutan sumber daya publik tersebut, kebersamaa mereka wujudkan dalam kehidupan yang harmonis sebagai sesama mantan pekerja pabrik.